

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis telah diatur dalam ketentuan UU Pilkada. Keberadaan UU Pilkada yang tidak selamanya dapat mengikuti dinamika Pilkada yang kompleks, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan tafsir diantara beberapa lembaga negara. Salah satu contoh terbaik ialah ketika MK melakukan *judicial activism* dalam menangani pelanggaran administrasi dan sengketa Pilkada dengan menyimpangi hukum positif yang berlaku. Tesis ini melakukan pengkajian terhadap tiga aspek yakni: (1) Pengaturan Hukum dalam penyelenggaraan Pilkada khususnya terkait pemenuhan syarat calon kepala daerah, (2) Pemenuhan Syarat Calon dan Pencalonan pada Pemilihan Bupati Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Sabu Raijua ditinjau berdasarkan norma dalam penegakan hukum Pilkada, (3) Mahkamah Konstitusi Menggunakan Doktrin *Judicial activism* dalam Memutuskan Diskualifikasi Calon atau Pasangan Calon pada Pilkada 2020.

Penelitian ini yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mana dalam penelitian ini mengkaji 3 (tiga) putusan MK. Sifat penelitian tesis ini adalah deskriptif kualitatif, hasil penelitian akan dianalisis menggunakan kerangka nilai, kerangka teori dan kerangka hukum yang diinterpretasikan secara kualitatif dengan argumentasi secara sistematis. Penelitian tesis ini menggunakan bahan penelitian berupa data sekunder (buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan) dan data tersier (kamus, ensiklopedia dan berita). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah bahan hukum primer (perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang, catatan resmi, dan putusan hakim).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait syarat calon kepala daerah yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU Pilkada dan PKPU Pilkada. bahwa pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan akan berakibat hukum berupa pembatalan pencalonannya oleh KPU. Dalam hal terdapat sengketa administrasi Pilkada yang bersifat TSM, maka penegakan hukum masuk dalam yurisdiksi MA atas dasar Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk sengketa administrasi Pilkada bukan TSM dapat diselesaikan melalui PTTUN hingga kasasi MA. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa *judicial activism* MK dalam penegakan hukum sengketa pelanggaran administrasi Pilkada dilakukan karena adanya perbedaan tafsir hukum antara lembaga, terdapat karakteristik sengketa pelanggaran administrasi yang belum pernah ada rujukan sebelumnya sehingga mendorong adanya yurisprudensi dan dalam rangka mewujudkan keadilan substantif yang konstitusional. MK sendiri bertindak sebagai *positive legislature* dalam memeriksa dan mengadili dengan melakukan *specificity of policy* yakni langkah pengadilan membentuk kebijakannya sendiri yang kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip diskresi yang dimiliki oleh lembaga lain atau individu lain

#### ABSTRACT

The Application of Regional Election to enacting democratic government system has been regulated by the Regional Election Law. The existence of Regional Election Law unusual address a complex dynamics of Regional Election, Therefore, it is possible for many differences interpretation among state institutions. The best example of this case when Constitutional Court made their judicial activism to address administrative election disputes with reducing positive law.

This research was carried out using doctrinal legal research or normative legal research or library research. This research uses a conceptual approach, in which this research examines 3 (three) Constitutional Court decisions. The nature of this thesis research is descriptive qualitative, the research results will be analyzed using a value framework, theoretical framework and legal framework which are interpreted qualitatively with systematic argumentation. This thesis research uses research materials in the form of secondary data (books, journals, theses, theses, dissertations and statutory regulations). And tertiary data (dictionaries, encyclopedias and news). The legal materials used in this thesis research are primary legal materials (legislation, minutes of law making, official records, and judge's decisions).

The results of the research show that the requirements for regional head candidates are regulated in the provisions of Article 7 of the Regional Election Law and PKPU Regional Election. that candidate pairs who do not meet the requirements will have legal consequences in the form of cancellation of their candidacy by the KPU. In the event that there is a regional election administration dispute of a TSM nature, law enforcement falls within the jurisdiction of the Supreme Court on the basis of the Regency/City Bawaslu Decision and the Regency/City KPU Decision. Meanwhile, non-TSM Pilkada administration disputes can be resolved through the PTTUN to the Supreme Court's cassation. From the results of the research that has been carried out, it can be seen that the Constitutional Court's judicial activism in enforcing the law in regional election administrative violation disputes is carried out because there are differences in legal interpretation between institutions, there are characteristics of administrative violation disputes that have never been referred to before, thus encouraging jurisprudence and in order to realize substantive justice. constitutional. The Constitutional Court itself acts as a positive legislature in examining and adjudicating by carrying out Specificity of Policy, namely the court's steps in forming its own policies where these policies conflict with the discretionary principles held by other institutions or other individuals.